



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN
ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan atas Laporan Keuangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), BPK telah memeriksa Laporan Keuangan Kabupaten Banyumas, yang terdiri dari Neraca per 31 Desember 2022, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas dan Laporan Perubahan Ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanggung Jawab Pemerintah atas Laporan Keuangan

Pemerintah Kabupaten Banyumas bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan dan pengendalian intern yang memadai untuk menyusun laporan keuangan yang bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung Jawab BPK

Tanggung jawab BPK adalah untuk menyatakan suatu opini atas Laporan Keuangan berdasarkan pemeriksaan BPK. BPK melaksanakan pemeriksaan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara. Standar tersebut mengharuskan BPK mematuhi kode etik BPK, serta merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan untuk memperoleh keyakinan yang memadai apakah laporan keuangan tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

Suatu pemeriksaan meliputi pengujian bukti-bukti yang mendukung angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih mendasarkan pada pertimbangan profesional pemeriksa, termasuk penilaian risiko salah saji yang material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko, Pemeriksa mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas untuk merancang prosedur pemeriksaan yang tepat sesuai dengan kondisi yang ada, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas efektivitas pengendalian intern Pemerintah Kabupaten Banyumas. Pemeriksaan yang dilakukan BPK juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan

kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Banyumas, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

BPK yakin bahwa bukti pemeriksaan yang telah diperoleh adalah cukup dan tepat, sebagai dasar untuk menyatakan opini BPK.

Opini

Menurut opini BPK, laporan keuangan yang disebut di atas, menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2022, dan realisasi anggaran, perubahan saldo anggaran lebih, operasional, arus kas, serta perubahan ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan atas SPI dan Kepatuhan

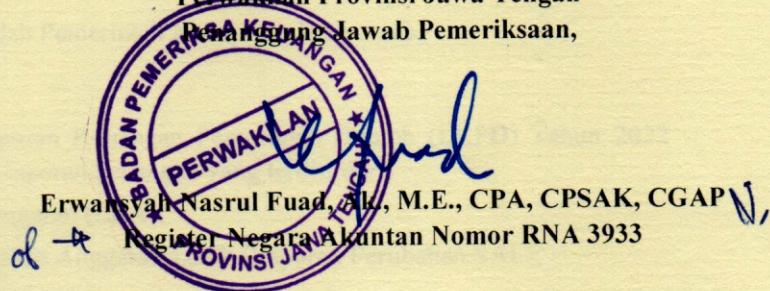
Untuk memperoleh keyakinan yang memadai atas kewajaran laporan keuangan tersebut, BPK juga melakukan pemeriksaan terhadap sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan disajikan dalam Laporan Nomor 45B/LHP/XVIII.SMG/05/2023 tanggal 8 Mei 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan ini.

Surabaya, 8 Mei 2023

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA**

Perwakilan Provinsi Jawa Tengah

Penanggung Jawab Pemeriksaan,



Erwansyah Nasrul Fuad, SE, M.E., CPA, CPSAK, CGAP, N,
Register Negara Akuntan Nomor RNA 3933

GAMBARAN UMUM PEMERIKSAAN

1. Dasar Hukum Pemeriksaan

- a. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; dan
- b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

2. Standar Pemeriksaan

Dalam rangka pencapaian tujuan pemeriksaan, pemeriksaan LKPD dilakukan berdasarkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) Tahun 2017. Pernyataan Standar Pemeriksaan (PSP) 100 mengenai Standar Umum pada Paragraf 32 menyatakan bahwa dalam pemeriksaan keuangan, SPKN memberlakukan standar audit yang dimuat dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) yang ditetapkan oleh asosiasi profesi akuntan publik, sepanjang tidak diatur lain dalam SPKN.

3. Tujuan Pemeriksaan

Pemeriksaan BPK dilakukan dengan tujuan untuk memberikan Opini atas kewajaran LKPD, dengan mempertimbangkan:

- a. Kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP);
- b. Kecukupan pengungkapan sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam SAP;
- c. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Efektivitas sistem pengendalian intern.

4. Entitas yang Diperiksa

Entitas yang diperiksa adalah Pemerintah Kabupaten Banyumas.

5. Lingkup Pemeriksaan

Lingkup pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2022 meliputi pemeriksaan atas laporan keuangan yang terdiri dari:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL);
- c. Neraca;
- d. Laporan Operasional (LO);
- e. Laporan Arus Kas (LAK);
- f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

6. Sasaran Pemeriksaan

Sasaran pemeriksaan LKPD Tahun 2022 meliputi pengujian atas:

- a. Kewajaran penyajian saldo akun dalam Neraca per 31 Desember 2022;
- b. Kewajaran penyajian saldo akun dan transaksi pada LRA, Laporan Perubahan SAL, LO, LAK, dan LPE Tahun 2022;
- c. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan pada CaLK;

- d. Konsistensi penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan LKPD;
- e. Efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern, termasuk pertimbangan hasil pemeriksaan sebelumnya yang terkait dengan penyajian dan pengungkapan akun-akun dalam laporan keuangan; dan
- f. Kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pengelolaan keuangan daerah dalam rangka penyusunan LKPD.

7. Metodologi Pemeriksaan

Pemeriksaan LKPD Tahun 2022 dilakukan dengan pendekatan audit berbasis risiko, yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil pemeriksaan.

Dalam perencanaan pemeriksaan, metode yang dilakukan meliputi pemahaman tujuan dan harapan penugasan untuk mengetahui fokus atau sasaran yang harus diperhatikan pemeriksa. Pengembangan prosedur pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh tim pemeriksa berdasarkan fokus atau sasaran pemeriksaan yang telah dirumuskan tersebut.

Selanjutnya pemeriksa melakukan pemahaman entitas dan proses bisnis, pemahaman hasil pemeriksaan sebelumnya, pemahaman atas sistem pengendalian intern, identifikasi dan penilaian risiko awal, penetapan batas materialitas awal, penentuan metode uji petik. Penentuan metode uji petik berdasarkan pertimbangan profesional pemeriksa dengan memperhatikan beberapa aspek, antara lain matriks penilaian risiko tingkat risiko, tingkat materialitas yang telah ditentukan, *cost and benefit* (manfaat uji petik atas suatu transaksi atau saldo akun harus lebih besar dari biaya pengujian). Jumlah sampel tidak hanya didasarkan pada nilai saldo akun, tetapi memperhatikan transaksi-transaksi yang membentuk saldo tersebut. Saldo akun yang kecil bisa dibentuk dari transaksi-transaksi positif dan negatif yang besar.

Berdasarkan penilaian risiko yang dilakukan dalam perencanaan pemeriksaan, selanjutnya Pemeriksa melakukan pengujian analitis (menemukan hubungan logis penyajian akun pada laporan keuangan, menilai kecukupan pengungkapan atas setiap perubahan pada pos/akun/unsur pada laporan keuangan yang diperiksa, serta menentukan area-area signifikan dalam pengujian SPI dan pengujian substantif atas transaksi dan saldo), pengujian pengendalian (pengujian terhadap efektivitas desain dan implementasi sistem pengendalian intern dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD), pengujian substantif atas transaksi dan saldo (pengujian atas transaksi dan saldo-saldo akun/perkiraan serta penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan yang diperiksa) dan penyelesaian penugasan (penyusunan, penyampaian, dan pembahasan temuan pemeriksaan dan usulan jurnal penyesuaian serta perolehan tanggapan instansi).

Setelah Pemeriksa menyelesaikan pelaksanaan pemeriksaan, selanjutnya Pemeriksa menyimpulkan hasil pemeriksaan dan dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP).

8. Jangka Waktu Pemeriksaan

Pemeriksaan dilakukan selama 30 hari mulai tanggal 16 Maret s.d. 14 April 2023, berdasarkan Surat Tugas Nomor 156/ST/XVIII.SMG/03/2023 tanggal 10 Maret 2023.

9. Batasan Pemeriksaan

Semua informasi yang disajikan dalam laporan keuangan merupakan tanggung jawab

manajemen. Oleh karena itu, BPK tidak bertanggung jawab terhadap salah interpretasi dan kemungkinan pengaruh atas informasi yang tidak diberikan baik yang sengaja maupun tidak disengaja oleh manajemen.

Pemeriksaan BPK meliputi prosedur-prosedur yang dirancang untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mendeteksi adanya kesalahan dan salah saji yang berpengaruh material terhadap laporan keuangan. Pemeriksaan BPK tidak ditujukan untuk menemukan kesalahan atau penyimpangan. Walaupun demikian, jika dari hasil pemeriksaan ditemukan penyimpangan, akan diungkapkan.

Dalam melaksanakan pemeriksaan, BPK juga menyadari kemungkinan adanya perbuatan-perbuatan melanggar hukum yang timbul. Namun pemeriksaan BPK tidak memberikan jaminan bahwa semua tindakan melanggar hukum akan terdeteksi dan hanya memberikan jaminan yang wajar bahwa tindakan melanggar hukum yang berpengaruh secara langsung dan material terhadap angka-angka dalam laporan keuangan akan terdeteksi. BPK akan menginformasikan bila ada perbuatan-perbuatan melanggar hukum atau kesalahan/penyimpangan material yang ditemukan selama pemeriksaan.

Dalam melaksanakan pengujian kepatuhan atas ketentuan peraturan perundang-undangan, BPK hanya menguji kepatuhan instansi atas peraturan perundang-undangan yang terkait langsung dengan penyusunan laporan keuangan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa masih terdapat ketidakpatuhan pada peraturan yang tidak teridentifikasi.

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN



BUPATI BANYUMAS

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas Tahun Anggaran 2022, yang terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan, dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai standar akuntansi pemerintah.





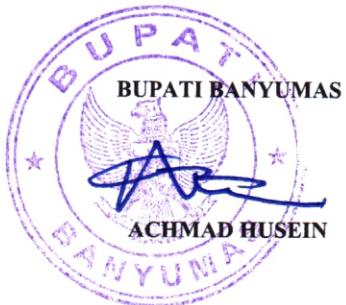
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN REALISASI ANGGARAN DAN BELANJA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Catatan	Anggaran 2022 (Perubahan)	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021			
		Rp			Rp			
PENDAPATAN								
PENDAPATAN ASLI DAERAH								
Pendapatan Pajak Daerah	5.1.A.1.a	307.546.471.000,00	267.236.064.377,00	86,89	222.525.782.288,00			
Pendapatan Retribusi Daerah	5.1.A.1.b	22.493.656.435,00	26.130.786.681,00	116,17	23.687.898.823,00			
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.1.A.1.c	21.000.000.000,00	21.801.615.649,00	103,82	15.507.581.925,00			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	5.1.A.1.d	513.111.244.825,00	507.517.525.434,84	98,91	500.270.177.137,00			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		864.151.372.260,00	822.685.992.141,84	95,20	761.991.440.173,00			
PENDAPATAN TRANSFER								
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan								
Dana Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.a	47.788.794.319,00	51.280.979.747,00	107,31	56.584.800.161,00			
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam)	5.1.A.2.a	2.863.673.000,00	3.574.498.957,00	124,82	2.506.021.548,00			
Dana Alokasi Umum	5.1.A.2.a	1.289.633.614.000,00	1.280.141.707.164,00	99,26	1.289.633.614.000,00			
Dana Alokasi Khusus	5.1.A.2.a	628.562.905.733,00	577.729.669.669,00	91,91	533.105.229.215,00			
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan		1.968.848.987.052,00	1.912.726.855.537,00	97,15	1.881.829.664.924,00			
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya								
Dana Otonomi Khusus	5.1.A.2.b	0,00	0,00	~	0,00			
Dana Penyesuaian	5.1.A.2.b	30.603.775.000,00	30.603.775.000,00	100,00	19.361.734.000,00			
Dana Desa	5.1.A.2.b	383.196.882.000,00	371.196.905.880,00	96,87	381.247.099.000,00			
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya		413.800.657.000,00	401.800.680.880,00	97,10	400.608.833.000,00			
Transfer Pemerintah Provinsi								
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.1.A.2.c	241.145.710.000,00	253.570.782.196,00	105,15	233.070.254.488,00			
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	5.1.A.2.c	21.788.000.000,00	21.599.433.339,00	99,13	20.129.335.915,00			
Jumlah Pendapatan Transfer Pemerintah Provinsi		262.933.710.000,00	275.170.215.535,00	104,65	253.199.590.403,00			
Jumlah Pendapatan Transfer		2.645.583.354.052,00	2.589.697.751.952,00	97,89	2.535.638.088.327,00			
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
Pendapatan Hibah	5.1.A.3	10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	30.775.169.520,00			
Pendapatan Dana Darurat		0,00	0,00	~	0,00			
Pendapatan Lainnya	5.1.A.3	0,00	0,00	~	159.318.202.390,00			
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		10.213.081.396,00	14.024.437.570,00	137,32	190.093.371.910,00			
JUMLAH PENDAPATAN		3.519.947.807.708,00	3.426.408.181.663,84	97,34	3.487.722.900.410,00			

	Catatan	Anggaran 2022 (Perubahan)	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021
		Rp			Rp
BELANJA					
BELANJA OPERASI					
Belanja Pegawai	5.1.B.1.a	1.581.450.189.632,00	1.451.366.997.587,00	91,77	1.398.098.601.191,00
Belanja Barang	5.1.B.1.b	1.014.347.631.048,00	896.365.360.138,00	88,37	822.140.656.636,00
Belanja Bunga	5.1.B.1.c	10.800.000.006,00	9.322.835.019,00	86,32	570.163.094,00
Belanja Subsidi		0,00	0,00	~	0,00
Belanja Hibah	5.1.B.1.d	79.117.824.000,00	78.073.991.484,00	98,68	63.420.758.764,00
Belanja Bantuan Sosial	5.1.B.1.e	12.991.270.437,00	9.044.271.400,00	69,62	10.865.621.400,00
Jumlah Belanja Operasi		2.698.706.915.123,00	2.444.173.455.628,00	90,57	2.295.095.801.085,00
BELANJA MODAL					
Belanja Tanah	5.1.B.2	16.750.522.000,00	2.307.762.514,00	13,78	12.781.710.449,00
Belanja Peralatan dan Mesin	5.1.B.2	140.797.499.909,00	122.539.063.761,00	87,03	108.280.757.683,00
Belanja Gedung dan Bangunan	5.1.B.2	238.054.938.600,00	222.410.863.132,00	93,43	203.318.241.966,00
Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.1.B.2	123.624.348.625,00	118.808.411.347,00	96,10	100.697.645.954,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	5.1.B.2	13.493.017.947,00	11.281.964.844,00	83,61	7.156.890.177,00
Belanja Modal Aset Lainnya	5.1.B.2	7.150.000.000,00	1.688.000.000,00	23,61	0,00
Jumlah Belanja Modal		539.870.327.081,00	479.036.065.598,00	88,73	432.235.246.229,00
BELANJA TAK TERDUGA					
Belanja Tak Terduga	5.1.B.3	39.674.740.000,00	28.163.884.848,00	70,99	77.757.965.424,00
Jumlah Belanja Tak Terduga		39.674.740.000,00	28.163.884.848,00	70,99	77.757.965.424,00
JUMLAH BELANJA		3.278.251.982.204,00	2.951.373.406.074,00	90,03	2.805.089.012.738,00
TRANSFER					
TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN					
Bagi Hasil Pajak	5.1.C.1	35.943.564.931,00	29.582.380.341,00	82,30	20.916.759.399,00
Bagi Hasil Retribusi	5.1.C.1	2.606.435.069,00	2.450.257.878,00	94,01	2.589.057.551,00
Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer/ Bagi Hasil Pendapatan		38.550.000.000,00	32.032.638.219,00	83,09	23.505.816.950,00
TRANSFER BANTUAN KEUANGAN					
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		0,00	0,00	~	0,00
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	5.1.C.2	639.217.010.000,00	617.441.322.880,00	96,59	602.289.456.465,00
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	5.1.C.2	250.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Transfer Dana Otonomi Khusus		0,00	0,00	~	0,00
Jumlah Transfer Bantuan Keuangan		639.467.010.000,00	617.441.322.880,00	96,56	602.289.456.465,00
JUMLAH TRANSFER		678.017.010.000,00	649.473.961.099,00	95,79	625.795.273.415,00
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER		3.956.268.992.204,00	3.600.847.367.173,00	91,02	3.430.884.286.153,00
SURPLUS/(DEFISIT)		(436.321.184.496,00)	(174.439.185.509,16)	39,98	56.838.614.257,00

	Catatan	Anggaran 2022 (Perubahan)	Realisasi 2022 Rp	%	Realisasi 2021			
		Rp			Rp			
PEMBIAYAAN								
PENERIMAAN PEMBIAYAAN								
Penggunaan SiLPA	5.1.D.1	369.896.692.236,00	369.896.692.236,00	100,00	294.230.476.359,00			
Pencairan Dana Cadangan		0,00	0,00	~	0,00			
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		0,00	0,00	~	0,00			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.1.D.1	116.928.492.260,00	116.794.431.030,00	99,89	68.575.601.620,00			
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.1	1.000.000.000,00	0,00	0,00	0,00			
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		487.825.184.496,00	486.691.123.266,00	99,77	362.806.077.979,00			
PENGELUARAN PEMBIAYAAN								
Pembentukan Dana Cadangan	5.1.D.2	25.000.000.000,00	25.000.000.000,00	100,00	20.000.000.000,00			
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.1.D.2	25.004.000.000,00	24.746.000.000,00	98,97	28.249.000.000,00			
Pembayaran Cicilan Pokok Utang		0,00	0,00	~	0,00			
Pemberian Pinjaman Daerah	5.1.D.2	1.500.000.000,00	0,00	0,00	1.499.000.000,00			
Pengeluaran Investasi Non Permanen Lainnya	5.1.D.2	0,00	0,00	~	0,00			
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan		51.504.000.000,00	49.746.000.000,00	96,59	49.748.000.000,00			
PEMBIAYAAN NETO		436.321.184.496,00	436.945.123.266,00	100,14	313.058.077.979,00			
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN		0,00	262.505.937.756,84	~	369.896.692.236,00			

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH
PER 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Catatan	2022	2021
		Rp	Rp
SALDO ANGGARAN LEBIH AWAL		369.896.692.236,00	294.230.476.359,00
Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	5.2.A	369.896.692.236,00	294.230.476.359,00
		0,00	0,00
Sub Total		262.505.937.756,84	369.896.692.236,00
Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	5.2.B	262.505.937.756,84	369.896.692.236,00
		262.505.937.756,84	369.896.692.236,00
Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya		0,00	0,00
Lain-lain		0,00	0,00
SALDO ANGGARAN LEBIH AKHIR	5.2.C	262.505.937.756,84	369.896.692.236,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



**PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS****NERACA**

Per 31 Desember 2022 dan 2021

(Dalam Rupiah)

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
		Rp	Rp	
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Kas Daerah	5.3.A.1	217.430.497.985,00	261.966.442.541,00	
Kas di Bendahara Penerimaan	5.3.A.2	7.166.954,00	4.996.932,00	
Kas di Bendahara Pengeluaran	5.3.A.3	65.654.253,00	82.901.960,00	
Kas di BLUD	5.3.A.4	44.847.975.510,84	106.418.860.864,00	
Kas Lainnya	5.3.A.5	805.239.129,00	2.361.414.330,00	
Investasi Jangka Pendek	5.3.A.6	-	-	
Piutang				
Piutang Pendapatan	5.3.A.7	139.700.638.058,32	205.559.066.270,35	
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih	5.3.A.8	(88.177.503.399,79)	(87.710.501.874,00)	
Jumlah Piutang (Bersih)		51.523.134.658,53	117.848.564.396,35	
Beban Dibayar di Muka	5.3.A.9	129.153.288,00	175.561.357,50	
Persediaan	5.3.A.10	56.036.996.873,29	52.039.125.588,00	
Jumlah Aset Lancar		370.845.818.651,66	540.897.867.968,85	
INVESTASI JANGKA PANJANG				
Investasi Non Permanen	5.3.B.1			
Dana Bergulir		11.723.859.678,00	11.744.434.705,00	
Dana Bergulir Diragukan Tertagih	5.3.B.2	(4.485.645.906,20)	(4.366.379.866,65)	
Jumlah Investasi Non Permanen (Bersih)		7.238.213.771,80	7.378.054.838,35	
Investasi Permanen	5.3.B.3	418.678.480.142,43	386.173.870.873,62	
Jumlah Investasi Jangka Panjang		425.916.693.914,23	393.551.925.711,97	
ASET TETAP				
Tanah	5.3.C.1	3.594.841.536.167,87	3.450.040.187.351,87	
Peralatan dan Mesin	5.3.C.2	1.381.337.913.152,11	1.236.320.901.236,11	
Gedung dan Bangunan	5.3.C.3	2.137.435.427.066,15	1.850.601.192.656,14	
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.3.C.4	2.905.455.719.397,00	2.676.435.728.540,00	
Aset Tetap Lainnya	5.3.C.5	101.767.399.503,27	100.876.757.746,27	
Konstruksi dalam Pengerjaan	5.3.C.6	80.642.301.025,00	206.555.843.236,00	
Akumulasi Penyusutan	5.3.C.7	(3.770.179.517.245,56)	(3.324.125.907.801,67)	
Jumlah Aset Tetap		6.431.300.779.065,84	6.196.704.702.964,72	
DANA CADANGAN				
Dana Cadangan	5.3.D	45.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
Jumlah Dana Cadangan		45.000.000.000,00	20.000.000.000,00	
ASET LAINNYA				
Tagihan Piutang Penjualan Angsuran		-	-	
Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	5.3.E.1	758.550.000,00	758.550.000,00	
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	5.3.E.2	72.985.149.000,00	82.767.544.715,00	
Aset Tidak Berwujud	5.3.E.3	1.507.797.656,00	56.372.910,00	
Aset Lain-lain	5.3.E.4	97.138.992.712,82	91.973.019.469,82	
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	5.3.E.5	(65.155.694.100,32)	(68.426.952.110,32)	
Jumlah Aset Lainnya		107.234.795.268,50	107.128.534.984,50	
JUMLAH ASET		7.380.298.086.900,23	7.258.283.031.630,04	

	Catatan	31 Desember 2022	31 Desember 2021	
		Rp	Rp	
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.3.F.1.a	707.251.723,00	599.803.097,00	
Utang Bunga	5.3.F.1.b	1.142.286.024,00	792.987.786,00	
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	5.3.F.1.c	11.500.000.000,00	11.500.000.000,00	
Pendapatan Diterima Dimuka	5.3.F.1.d	1.293.714.622,33	825.003.177,00	
Utang Belanja	5.3.F.1.e	34.857.276.716,00	141.396.400.421,00	
Utang Jangka Pendek Lainnya	5.3.F.1.f	2.367.578.067,00	2.330.836.292,00	
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		51.868.107.152,33	157.445.030.773,00	
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG				
Utang Dalam Negeri	5.3.F.2	185.370.032.650,00	68.575.601.620,00	
Utang Luar Negeri		-	-	
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		185.370.032.650,00	68.575.601.620,00	
JUMLAH KEWAJIBAN				
		237.238.139.802,33	226.020.632.393,00	
EKUITAS				
EKUITAS	5.3.G	7.143.059.947.097,90	7.032.262.399.237,04	
JUMLAH EKUITAS		7.143.059.947.097,90	7.032.262.399.237,04	
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		7.380.298.086.900,23	7.258.283.031.630,04	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan



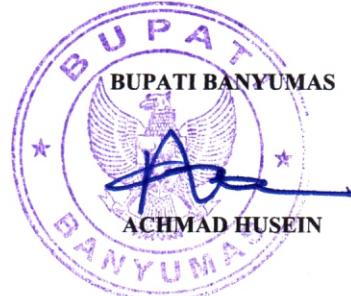


PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN OPERASIONAL
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Catatan	2022		Kenaikan/ (Penurunan)		% Rp		
		Rp	Rp	Rp	Rp			
KEGIATAN OPERASIONAL								
PENDAPATAN								
PENDAPATAN ASLI DAERAH								
Pendapatan Pajak Daerah	5.4.A.1.a	269.732.853.557,00	228.987.185.408,00	40.745.668.149,00	17,79			
Pendapatan Retribusi Daerah	5.4.A.1.b	26.748.346.527,00	23.304.971.779,00	3.443.374.748,00	14,78			
Pendapatan Hasil Pengelolaan								
Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5 A.1.c	30.156.015.215,75	28.366.641.098,32	1.789.374.117,43	6,31			
Lain-lain Pendapatan Asli Daerah								
yang Sah	5.4.A.1.d	452.546.028.722,63	542.597.037.148,00	(90.051.008.425,37)	(16,60)			
Jumlah Pendapatan Asli Daerah		779.183.244.022,38	823.255.835.433,32	(44.072.591.410,94)	(5,35)			
PENDAPATAN TRANSFER								
Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan								
Dana Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2.a	49.210.624.694,00	59.256.802.955,00	(10.046.178.261,00)	(16,95)			
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak								
(Sumber Daya Alam)	5.4.A.2.a	3.831.174.042,00	1.875.965.773,00	1.955.208.269,00	104,22			
Dana Alokasi Umum	5.4.A.2.a	1.280.141.707.164,00	1.289.633.614.000,00	(9.491.906.836,00)	(0,74)			
Dana Alokasi Khusus	5.4.A.2.a	577.729.669.669,00	533.105.229.215,00	44.624.440.454,00	8,37			
Jumlah Pendapatan Transfer		1.910.913.175.569,00	1.883.871.611.943,00	27.041.563.626,00	1,44			
Transfer Pemerintah Pusat-Lainnya								
Dana Otonomi Khusus		-	-	-	-	~		
Dana Penyesuaian	5.4.A.2.b	30.603.775.000,00	19.361.734.000,00	11.242.041.000,00	58,06			
Jumlah Pendapatan Transfer		30.603.775.000,00	19.361.734.000,00	11.242.041.000,00	58,06			
Transfer Pemerintah Provinsi								
Pendapatan Bagi Hasil Pajak	5.4.A.2	254.297.843.610,00	211.911.109.153,00	42.386.734.457,00	20,00			
Pendapatan Bagi Hasil lainnya	5.4.A.2	21.599.433.339,00	20.129.335.915,00	1.470.097.424,00	7,30			
Jumlah Pendapatan Transfer		275.897.276.949,00	232.040.445.068,00	43.856.831.881,00	18,90			
Jumlah Pendapatan Transfer		2.217.414.227.518,00	2.135.273.791.011,00	82.140.436.507,00	3,85			
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH								
Pendapatan Hibah	5.4.A.3	164.502.166.126,02	157.366.903.232,00	7.135.262.894,02	4,53			
Pendapatan Dana Darurat		-	-	-	~			
Pendapatan Lainnya	5.4.A.3	3.438.368.417,40	162.000.126.508,80	(158.561.758.091,40)	(97,88)			
Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah		167.940.534.543,42	319.367.029.740,80	(151.426.495.197,38)	(47,41)			
JUMLAH PENDAPATAN		3.164.538.006.083,80	3.277.896.656.185,12	(113.358.650.101,32)	(3,46)			

	Catatan	2022		2021		Kenaikan/ (Penurunan)	%
		Rp	Rp	Rp	Rp		
BEBAN							
Beban Pegawai	5.4.B.1	1.421.998.581.986,00	1.443.483.283.139,00	(21.484.701.153,00)	(1,49)		
Beban Barang dan Jasa	5.4.B.2	920.748.985.841,22	892.043.269.047,96	28.705.716.793,26	3,22		
Beban Bunga	5.4.B.3	9.672.133.257,00	1.363.150.880,00	8.308.982.377,00	609,54		
Beban Subsidi						~	
Beban Hibah	5.4.B.4	77.982.207.574,00	63.420.758.764,00	14.561.448.810,00	22,96		
Beban Bantuan Sosial	5.4.B.5	14.993.271.400,00	34.396.421.400,00	(19.403.150.000,00)	(56,41)		
Beban Penyusutan	5.4.B.6	379.978.840.612,96	246.136.833.565,52	133.842.007.047,44	54,38		
Beban Penyisihan	5.4.B.7	2.488.291.549,44	9.512.349.245,66	(7.024.057.696,22)	(73,84)		
Beban Transfer	5.4.B.8	278.277.055.219,00	244.548.174.415,00	33.728.880.804,00	13,79		
Beban Lain-lain	5.4.B.9	119.266.039,55	360.671.785,00	(241.405.745,45)	(66,93)		
JUMLAH BEBAN		3.106.258.633.479,17	2.935.264.912.242,14	170.993.721.237,03	5,83		
SURPLUS/(DEFISIT) DARI OPERASI		58.279.372.604,63	342.631.743.942,98	(284.352.371.338,35)	(82,99)		
SURPLUS / DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL							
Surplus Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-	~	
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	5.4.C	126.038.101.285,00	84.580.205,00	125.953.521.080,00	148.916,07		
Defisit Penjualan Aset Non Lancar		-	-	-	-	~	
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		-	-	-	-	~	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	5.4.C	(2.518.041.674,00)	32.847.854.826,00	(35.365.896.500,00)	(107,67)		
Jumlah Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		(128.556.142.959,00)	32.763.274.621,00	90.587.624.580,00	276,49		
SURPLUS/(DEFISIT) SEBELUM POS LUAR BIASA		186.835.515.563,63	309.868.469.321,98	(193.764.746.758,35)	(62,53)		
POS LUAR BIASA							
Pendapatan Luar Biasa		-	-	-	-	~	
Beban Luar Biasa	5.4.D	99.104.463,00	8.643.090.589,00	(8.543.986.126,00)	(98,85)		
Jumlah Pos Luar Biasa		(99.104.463,00)	(8.643.090.589,00)	8.543.986.126,00	(98,85)		
SURPLUS/(DEFISIT)-LO		186.736.411.100,63	301.225.378.732,98	(185.220.760.632,35)	(61,49)		

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021

	Catatan	Tahun 2022	Tahun 2021	
		Rp	Rp	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi				
<i>Arus Masuk Kas</i>				
Penerimaan Pajak Daerah	5.5.A.1	267.233.894.355,00	222.544.965.148,00	
Penerimaan Retribusi Daerah	5.5.A.1	26.130.786.681,00	23.698.321.273,00	
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	5.5.A.1	21.801.615.649,00	15.507.581.925,00	
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	5.5.A.1	506.088.677.699,84	499.527.537.137,00	
Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	51.280.979.747,00	56.584.800.161,00	
Penerimaan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak	5.5.A.1	3.574.498.957,00	2.506.021.548,00	
Penerimaan Dana Alokasi Umum	5.5.A.1	1.280.141.707.164,00	1.289.633.614.000,00	
Penerimaan Dana Alokasi Khusus	5.5.A.1	577.729.669.669,00	533.105.229.215,00	
Penerimaan Dana Otonomi Khusus		-	-	
Penerimaan Dana Penyesuaian	5.5.A.1	30.603.775.000,00	19.361.734.000,00	
Penerimaan Dana Desa	5.5.A.1	371.196.905.880,00	381.247.099.000,00	
Penerimaan Bagi Hasil Pajak	5.5.A.1	253.570.782.196,00	233.070.254.488,00	
Penerimaan Bagi Hasil Lainnya	5.5.A.1	21.599.433.339,00	20.129.335.915,00	
Penerimaan Hibah	5.5.A.1	14.024.437.570,00	30.775.169.520,00	
Penerimaan Dana Darurat		-	-	
Penerimaan Lainnya	5.5.A.1	-	159.318.202.390,00	
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		3.424.977.163.906,84	3.487.009.865.720,00	
<i>Arus Keluar Kas</i>				
Pembayaran Pegawai	5.5.A.2	1.451.366.997.587,00	1.398.098.601.191,00	
Pembayaran Barang dan Jasa	5.5.A.2	896.365.360.138,00	822.140.656.636,00	
Pembayaran Bunga	5.5.A.2	9.322.835.019,00	570.163.094,00	
Pembayaran Subsidi		-	-	
Pembayaran Hibah	5.5.A.2	78.073.991.484,00	63.420.758.764,00	
Pembayaran Bantuan Sosial	5.5.A.2	9.044.271.400,00	10.865.621.400,00	
Pembayaran Bantuan Keuangan	5.5.A.2	617.441.322.880,00	602.289.456.465,00	
Pembayaran Tak Terduga	5.5.A.2	28.163.884.848,00	77.757.965.424,00	
Pembayaran Bagi Hasil Pajak	5.5.A.2	29.582.380.341,00	20.916.759.399,00	
Pembayaran Bagi Hasil Retribusi	5.5.A.2	2.450.257.878,00	2.589.057.551,00	
Pembayaran Bagi Hasil Pendapatan Lainnya		-	-	
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		3.121.811.301.575,00	2.998.649.039.924,00	
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi				
<i>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</i>		303.165.862.331,84	488.360.825.796,00	
<i>Arus Masuk Kas</i>				
Pencairan Dana Cadangan		-	-	
Penerimaan Penjualan atas Tanah		-	-	
Penerimaan Penjualan atas Peralatan dan Mesin	5.5.B.1	4.100.000,00	257.250.000,00	
Penerimaan penjualan atas Gedung dan Bangunan	5.5.B.1	114.702.000,00	235.700.000,00	
Penerimaan Penjualan atas Jalan, Irigasi dan Jaringan		-	-	
Penerimaan dari Penjualan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.1	700.000,00	77.200.000,00	
Penerimaan dari Penjualan Aset Lainnya	5.5.B.1	1.309.345.735,00	172.490.000,00	
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		-	-	
Penerimaan Penjualan Investasi Non Permanen		-	-	
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		1.428.847.735,00	742.640.000,00	

	Catatan	Tahun 2022	Tahun 2021
		Rp	Rp
Arus Keluar Kas			
Pembentukan Dana Cadangan	5.5.B.2	25.000.000.000,00	20.000.000.000,00
Perolehan Tanah	5.5.B.2	2.307.762.514,00	12.781.710.449,00
Perolehan Peralatan dan Mesin	5.5.B.2	122.539.063.761,00	108.280.757.683,00
Perolehan Gedung dan Bangunan	5.5.B.2	222.410.863.132,00	203.318.241.966,00
Perolehan Jalan, Irigasi dan Jaringan	5.5.B.2	118.808.411.347,00	100.697.645.954,00
Perolehan Aset Tetap Lainnya	5.5.B.2	11.281.964.844,00	7.156.890.177,00
Perolehan Aset Lainnya		1.688.000.000,00	-
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	5.5.B.2	24.746.000.000,00	28.249.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		528.782.065.598,00	480.484.246.229,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi			
		(527.353.217.863,00)	(479.741.606.229,00)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Pinjaman Daerah	5.5.C	116.794.431.030,00	68.575.601.620,00
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	5.5.C	-	-
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		116.794.431.030,00	68.575.601.620,00
Arus Keluar Kas			
Pembayaran Pokok Utang	5.5.C	-	-
Pemberian Pinjaman Daerah	5.5.C	-	1.499.000.000,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		-	1.499.000.000,00
		116.794.431.030,00	67.076.601.620,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan			
Arus Kas dari Aktivitas Transitoris			
Arus Masuk Kas			
Penerimaan Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.1	147.052.176.598,00	144.961.319.406,00
<i>Jumlah Arus Masuk Kas</i>		147.052.176.598,00	144.961.319.406,00
Arus Keluar Kas			
Pengeluaran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	5.5.D.2	146.941.763.988,00	144.885.558.822,00
<i>Jumlah Arus Keluar Kas</i>		146.941.763.988,00	144.885.558.822,00
		110.412.610,00	75.760.584,00
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris			
Kenaikan / (Penurunan) Kas			
Saldo Awal Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran		(107.282.511.891,16)	75.771.581.771,00
Saldo Akhir Kas Daerah dan Bendahara Pengeluaran		370.385.521.337,00	294.613.939.566,00
		263.103.009.445,84	370.385.521.337,00
Kas di Bendahara Penerimaan			
Kas Lainnya		7.166.954,00	4.996.932,00
		46.357.432,00	444.098.358,00
Saldo Akhir Kas		263.156.533.831,84	370.834.616.627,00

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2022 DAN 2021
(Dalam Rupiah)

	Catatan	2022		2021	
		Rp		Rp	
EKUITAS AWAL	5.6.A	7.032.262.399.237,04		6.486.770.354.066,71	
SURPLUS/DEFISIT-LO Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:	5.6.B	186.736.411.100,63		301.225.378.732,98	
Koreksi Nilai Persediaan		-		-	
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-		-	
Lain-lain	5.6.C	(75.938.863.239,77)		244.266.666.437,35	
EKUITAS AKHIR		7.143.059.947.097,90		7.032.262.399.237,04	

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian tidak terpisahkan dari laporan keuangan





Pemerintah Kabupaten Banyumas
Catatan atas Laporan Keuangan
Untuk Tahun yang Berakhir 31 Desember 2022

BAB VII
PENUTUP

LKPD Kabupaten Banyumas TA 2022 ini dimaksudkan untuk memberikan informasi secara menyeluruh mengenai pelaksanaan APBD Kabupaten Banyumas TA 2022 dan posisi keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyumas tanggal 31 Desember 2022. Selanjutnya informasi dalam LKPD ini diharapkan dapat dipergunakan oleh para pemangku kepentingan sebagai bahan masukan dan pertimbangan dalam pelaksanaan evaluasi kinerja, penentuan arah kebijakan penyelenggaraan pemerintahan pada tahun anggaran yang akan datang, serta pengambilan keputusan lainnya.

Demikian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyumas TA 2022. Melalui laporan keuangan ini diharapkan secara bertahap terwujud pengelolaan keuangan yang transparan dan akuntabel.

Purwokerto, Mei 2023

